

**UNIVERSALISASI NORMA MORAL DALAM
TEORI ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS**



**FERDIAN DWI PRASTIYO
1323013010**

**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
SURABAYA
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi/karya tulis ilmiah saya, dengan judul: **UNIVERSALISASI NORMA MORAL DALAM TEORI ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS** untuk dipublikasikan atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu *Digital Library* Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Demikian pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Juni 2017



Ferdian Dwi Prastiyo

1323013010

**LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH
NON PLAGIAT**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
hasil tugas akhir ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini
merupakan hasil plagiarisme, maka saya bersedia
menerima sanksi berupa pembatalan kelulusan
dan atau pencabutan gelar yang saya peroleh.

Surabaya, 5 Juni 2017



Ferdian Dwi Prastiyo

1323013010

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBIMBING

**UNIVERSALISASI NORMA MORAL
DALAM TEORI ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
menyelesaikan Program Strata Satu
di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

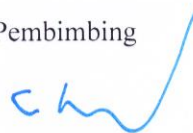
OLEH:

Ferdian Dwi Prastiyo

1323013010

Telah disetujui pada tanggal 5 Juni 2017 dan dinyatakan LULUS

Pembimbing



X. Chandra H. Marbun, Lic. Theol

NIK. 132.11.0712

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah Tritunggal Mahakudus karena kasih setia dan limpahan berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UNIVERSALISASI NORMA MORAL DALAM TEORI ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan membahas tentang universalisasi norma moral dalam teori etika dikursus yang dirumuskan oleh Jürgen Habermas.

Proses penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Msgr. Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Keuskupan Surabaya dan para romo Seminari Tinggi Providentia Dei, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menempuh studi filsafat di Fakultas Filsafat UKWMS.
2. Datu Hendrawan M. Fil., selaku dosen pembimbing, yang telah dengan setia dan tekun memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Agustinus Ryadi, selaku dekan serta para dosen F. Filsafat UKWMS, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam hal mendalami ilmu filsafat serta berfilsafat itu sendiri.
4. Keluarga penulis, Martinus Surateman (Bapak), Fransiska Surati (Ibu), Yohanes Suryadi Prasetyo (Kakak), Monica Hana (Kakak ipar), Maria Anindya Arsyia Asmiranda (Keponakan) dan Joachim Wiliam Prasetyo

(Keponakan), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi.

5. Rekan-rekan seperjalanan panggilan (Fr. Theo, Fr. Yudi, Fr. Titus) dan rekan-rekan seangkatan dalam perkuliahan (Michael, Manyela, Joni, Lukas, Banu, Sonny) serta semua rekan di Seminari Tinggi Providentia Dei, yang senantiasa menemani dalam segala situasi dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam berbagai macam cara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa segala usaha yang telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini adalah suatu proses pembelajaran yang tidak pernah final. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati dan demi perkembangan proses pembelajaran penulis, penulis dengan senang hati menerima segala bentuk masukan demi perbaikan skripsi ini lebih lanjut. Di samping itu, besar harapan penulis agar pada akhirnya gagasan-gagasan yang terkandung dalam skripsi ini dapat menjadi sepercik pencerahan bagi terciptanya *bonum communa* dalam masyarakat di zaman modern ini.

Surabaya, 5 Mei 2017

Ferdian Dwi Prastiyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH NON PLAGIAT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	x
<i>ABSTRACT</i>	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	6
1.4 METODE PENULISAN	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	7

BAB II: RIWAYAT HIDUP DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

FILOSOFIS JÜRGEN HABERMAS

2.1 RIWAYAT HIDUP JÜRGEN HABERMAS	9
2.1.1 <i>Hidup Jürgen Habermas</i>	9
2.1.2 <i>Karya-karya Jürgen Habermas</i>	15
2.2 PEMIKIRAN-PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI JÜRGEN HABERMAS	17
2.2.1 <i>Tradisi Pemikiran Kantian dan Marxian</i>	18
2.2.1.1 Pokok Pemikiran Tradisi Kantian dan Marxian	18

2.2.1.2 Pengaruh Tradisi Pemikiran Kantian dan Marxian terhadap Pemikiran Jürgen Habermas	19
2.2.2 <i>Mazhab Frankfurt dan Generasi Teori Kritis Pertama</i>	21
2.2.2.1 Pemikiran Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno	27
2.2.2.2 Pengaruh Pemikiran Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno terhadap Pemikiran Jürgen Habermas	29
2.2.3 <i>Tradisi Pemikiran Pragmatisme Amerika dan Tradisi Pemikiran Hermeneutik Jerman</i>	31
2.2.3.1 Pokok Pemikiran Tradisi Pragmatisme Amerika dan Hermeneutik Jerman	31
2.2.3.2 Pengaruh Pemikiran Pragmatisme Amerika dan Hermeneutik Jerman terhadap Pemikiran Jürgen Habermas	33
2.2.4 <i>Tradisi Pemikiran Linguistic Analysis Anglo-Amerika</i>	35
2.2.4.1 Pokok Pemikiran <i>Linguistic Analysis</i> Anglo-Amerika	35
2.2.4.2 Pengaruh Pemikiran <i>Linguistic Analysis</i> Anglo-Amerika terhadap Pemikiran Jürgen Habermas	37
2.3 POKOK PEMIKIRAN FILOSOFIS JÜRGEN HABERMAS	38

BAB III: UNIVERSALISASI NORMA MORAL DALAM TEORI ETIKA

DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS

3.1 TEORI DISKURSUS	43
3.1.1 <i>Rasio Komunikatif dan Rasio Prosedural</i>	45
3.1.2 <i>Tindakan Komunikatif dan Klaim-klaim Kesahihan</i>	50
3.1.3 <i>Teori Diskursus dan Diskursus Teoritis</i>	56

3.2	ETIKA DISKURSUS	60
3.2.1	<i>Etika Diskursus sebagai Diskursus Praktis</i>	61
3.2.2	<i>Etika Diskursus Bertujuan untuk Integrasi Sosial</i>	65
3.2.3	<i>Etika Diskursus sebagai Teori tentang Moralitas</i>	68
3.3	UNIVERSALISASI NORMA MORAL DALAM TEORI ETIKA DISKURSUS	71
3.3.1	<i>Diskursus Moral sebagai Suatu Proses Universalisasi</i>	75
3.3.2	<i>Prinsip (“U”) dan Prinsip (“D”)</i>	78
3.3.3	<i>Pembuktian Prinsip Penguniversalan</i>	83
3.3.4	<i>Universalisasi Norma Moral dan Demokrasi Deliberatif</i>	89
3.4	TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNIVERSALISASI NORMA DALAM TEORI MENURUT ETIKA DISKURSUS	93

BAB IV: PENUTUP

4.1	RELEVANSI	97
4.1.1	<i>Kebangkitan Populisme dalam Perpolitikan Global dan Nasional</i>	98
4.1.2	<i>Kebangkitan Populisme sebagai Ciri Masyarakat Pasca Sekular menurut Jürgen Habermas</i>	101
4.1.3	<i>Urgensi Prosedur Universalisasi Norma Moral dalam Teori Etika Diskursus Jürgen Habermas</i>	105
4.1.4	<i>Universalisasi Norma Moral sebagai Jalan Integrasi Sosial</i>	111
4.1.5	<i>Pendidikan sebagai Sarana Pembudayaan Demokrasi Deliberatif</i>	113
4.2	KESIMPULAN	118

DAFTAR PUSTAKA	125
-----------------------------	-----

ABSTRAKSI

UNIVERSALISASI NORMA MORAL DALAM TEORI ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS

FERDIAN DWI PRASTIYO

1323013010

Karya tulis ini berjudul “UNIVERSALISASI NORMA MORAL DALAM TEORI ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS”. Ada dua permasalahan pokok yang hendak dikaji dalam karya tulis ini: (1) apa itu etika diskursus Jürgen Habermas; (2) bagaimana universalisasi norma moral menurut etika diskursus. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengkaji dan mempelajari pemikiran universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas. Untuk itu, penulis menggunakan metode penulisan berupa studi pustaka.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis akan memaparkan gagasan-gagasan mengenai universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas sebagai berikut:

Pertama, pemikiran filosofis Habermas berangkat dari upaya pencarian syarat kemungkinan kehidupan bersama secara politis di dalam masyarakat-masyarakat kompleks dewasa ini. Teori diskursus adalah pengembangan Teori Kritis dengan menambahkan gagasan tentang rasio komunikatif. Habermas kemudian merumuskan pemikirannya tentang unsur dasar pembentuk masyarakat, yaitu tindakan komunikatif. Habermas kemudian mengembangkan konsep *Lebenswelt* (dunia-kehidupan) sebagai pelengkap untuk konsep tindakan komunikatif. Dengan tujuan untuk kembali mencapai suatu integrasi sosial, maka *dunia-kehidupan* harus semakin rasional. Rasionalisasi *dunia-kehidupan* berarti bahwa semakin banyak bidang dihayati menurut kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah diskursus bersama.

Berangkat dari pemikiran tentang tindakan komunikatif Habermas kemudian merumuskan pemikiran tentang teori diskursus. Dalam diskursus, suatu konsensus dihasilkan pada taraf yang reflektif dengan memakai sarana argumentasi.

Habermas kemudian membedakan teori diskursus dalam dua bidang besar, yaitu diskursus teoretis dan diskursus praktis. Diskursus teoretik adalah analisa tentang struktur dan syarat klaim kebenaran yang masih bersifat hipotetis apakah diterima atau ditolak secara argumentatif. Dalam diskursus teoretik Habermas membahas tentang konsep “situasi percakapan ideal” menyediakan landasan untuk pembahasan mengenai diskursus praktis. Di dalam proyek etika diskursus Habermas memusatkan diri pada tipe diskursus praktis.

Kedua, etika diskursus merupakan suatu praksis komunikasi yang bertujuan mencapai pemahaman bersama tentang suatu masalah berkaitan dengan legitimasi norma moral. Habermas merumuskan pemikiran tentang etika diskursus dengan memusatkan gagasannya pada tipe diskursus praktis. Di dalam tipe diskursus ini para peserta mempersoalkan klaim ketepatan dari norma-norma yang mengatur tindakan mereka dalam hidup bersama. Tujuan dari diskursus praktis adalah pemahaman timbal-balik antar norma-norma tindakan yang dipatuhi bersama. Hanya konsensus yang diterima oleh semua partisipan secara intersubjektif dan tanpa paksaan dapat dianggap rasional.

Etika diskursus dirumuskan oleh Habermas dalam kerangka gagasan besar untuk menyusun suatu pemikiran tentang integrasi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan. Habermas melihat bahwa integrasi sosial tidak lagi didasarkan pada norma-norma tradisional melainkan dari norma-norma yang dapat berlaku universal melalui pengujian intersubjektif. Habermas juga menyatakan bahwa etika diskursus adalah teori tentang moralitas. Habermas memberikan suatu pengertian yang distingtif tentang pengertian moral, yaitu “yang etis” (bersifat partikular) dan “yang moral” (bersifat universal). Habermas mengungkapkan bahwa moral adalah suatu yang bersifat “proseduralistis”, yakni sesuatu yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimanakah hubungan-hubungan interpersonal dapat diatur secara adil.

Ketiga, Habermas mengemukakan pokok etika diskursus adalah penetapan norma moral melalui proses universalisasi. Melalui proses universalisasi norma moral, Habermas menyatakan bahwa terdapat norma-norma yang dapat diberlakukan untuk kehidupan bersama. Dalam mencapai suatu norma moral yang bersifat absah, universalisasi norma moral adalah suatu prosedur yang menuntun pada proses penetapan norma-norma moral yang rasional dan universal. Universalisasi norma moral senantiasa berangkat dari gagasan tentang kepentingan-kepentingan yang dapat diuniversaliskan (*universalizable interests*). Habermas juga menyatakan bahwa diskursus nyata yang membahas tentang norma-norma moral yang dipertanyakan harus mampu melampaui perspektif

pribadi yang terbatas menuju suatu komunitas komunikasi yang tidak terbatas (*unlimited communication community*).

Dalam proses universalisasi norma moral terdapat dua prinsip dasar yaitu prinsip universalisasi (“U”) dan prinsip etika diskursus (“D”). Prinsip universalisasi (“U”) disebut juga sebagai prinsip moral. Prinsip ini ditujukan untuk menguji validitas suatu norma moral berkaitan dengan apakah norma tersebut dapat diuniversalkan atau tidak. Habermas menyebut prinsip universalisasi (“U”) atau prinsip moral sebagai suatu prinsip jembatan yang menuntun pada prinsip etika diskursus (“D”). Prinsip etika diskursus (“D”) ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua yang bersangkutan memang menyetujui akibat dan efek-efek norma tersebut apabila diberlakukan secara universal.

Habermas berupaya untuk membuktikan keabsahan prinsip universalisasi (“U”) dengan memakai sebagai metode pembuktian yang disebutnya sebagai *pragmatis-transendental*. Melalui metode ini Habermas hendak menyatakan bahwa hanya kalau prinsip universalisasi (“U”) diakui keberlakuannya maka orang dapat ikut dalam sebuah diskursus moral. Pembuktian prinsip penguniversalan kemudian menyatakan keterkaitan antara prinsip universalisasi (“U”) dan prinsip etika diskursus (“D”). Pertama, seseorang yang hendak masuk ke dalam sebuah argumentasi, maka ia mau atau tidak mau harus menerima peraturan-peraturan diskursus tadi. Kedua, dengan demikian ia juga menyetujui bahwa masalah-masalah bersama harus diatur sesuai dengan kepentingan bersama mereka yang bersangkutan.

Prosedur universalisasi norma moral sebagai pokok dalam etika diskursus kemudian diterapkan Habermas dalam bidang politik. Penerapan ini berkaitan dengan tujuan utama gagasan Habermas untuk mewujudkan gagasan tentang integrasi sosial. Habermas menarik suatu konsekuensi dari prosedur etika diskursus dalam hidup politis dalam pemikiran tentang demokrasi deliberatif. Dalam pemikiran tentang demokrasi deliberatif Habermas menjelaskan tentang kekuatan komunikatif masyarakat sipil untuk menyokong proses-proses pembuatan norma-norma publik agar terarah pada integrasi sosial.

Kata kunci: teori diskursus, integrasi sosial, diskursus praktis, etika diskursus, universalisasi norma moral

ABSTRACT

MORAL NORM UNIVERSALIZATION IN THE DISCOURSE ETHICS THEORY OF JÜRGEN HABERMAS

FERDIAN DWI PRASTIYO

1323013010

This paper is entitled "MORAL NORM UNIVERSALIZATION IN THE DISCOURSE ETHICS THEORY OF JÜRGEN HABERMAS". There are two main issues to be studied in this paper: (1) what the discourse ethics of Jürgen Habermas is; (2) how moral norms in the theory of discourse ethics are universalized. The goal of this paper is to study and assess the idea of universalization of moral norms according to discourse ethics of Jürgen Habermas. To do this, the author intends to use authoritative bibliographical sources.

The author intends to describe the ideas about the universalization of moral norms according to the discourse ethics of Jürgen Habermas as follows:

First, Habermas's philosophical thought departs from seeking the possibility of political co-existence in today's complex societies. Discourse theory is the development of the Critical Theory by adding the idea of communicative reason. Habermas then formulates his thoughts on the basic elements of the formation of society, namely communicative action. Habermas then developed the concept of *Lebenswelt* (the life-world) as a complement of the concept of communicative action. With the aim of re-achieving a social integration, *the life-world* must be more rational. The rationalization of the *life-world* means that more fields are lived according to the criteria that can be accounted for in a shared discourse.

Departing from the thought of the communicative action, Habermas then formulated the idea of the theory of discourse. In discourse, a consensus is produced at a reflective level by means of argumentation. Habermas then distinguishes the theory of discourse in two major fields, namely theoretical

discourse and practical discourse. Theoretical discourse is an analysis of the structure and terms of truth claims that are still hypothetical whether accepted or rejected argumentatively. In theoretical discourse Habermas discusses the concept of the "*ideal speech situation*" which provides the basis for discussion of practical discourse. In the Habermas ethics project, Habermas concentrates on the type of practical discourse.

Second, the discourse ethics is a communication praxis aimed at achieving a common understanding of a problem with regard to the legitimacy of moral norms. Habermas formulated the idea of the discourse ethics by focusing his ideas on the type of practical discourse. In this type of discourse the participants question the claims of accuracy of the norms governing their actions in living together. The purpose of practical discourse is mutual understanding between the norms of action that are shared. Only consensus accepted by all participants intersubjectively and without coercion can be considered rational.

The discourse ethics formulated by Habermas in the framework of a great idea for constructing a thought about social integration in society can be realized. Habermas sees that social integration is no longer based on traditional norms but from norms that can be universally applicable through intersubjective testing. Habermas also states that the discourse ethics is a theory of morality. Habermas provides a distinguishing understanding of the moral sense, "ethical" (particularistic) and "moral" (universal). Habermas reveals that morality is a "proceduralistic" thing, which is something related to the question of how interpersonal relationships can be arranged fairly.

Third, Habermas explores the point that discourse ethics is the determination of moral norms through the process of universalization. Through the process of universalizing moral norms, Habermas states that there are norms that can be applied to life together. In achieving a legitimate moral norm, the universalization of moral norms is a procedure that leads to the process of determining rational and universal moral norms. The universalization of moral norms always departs from the idea of universalizable interests. Habermas also stated that the real discourse concerning the questionable moral norms must be able to transcend limited private perspectives into an unlimited communication community.

In the process of universalizing moral norms, there are two basic principles, namely the principle of universalization ("U") and the principle of discourse ethics ("D"). The principle of universalization ("U") is also called a moral principle. This principle is intended to test the validity of a moral norm with regard to whether the norm can be universalized or not. Habermas calls the

principle of universalization ("U") or moral principle as a bridge principle that leads to the principle of discourse ethics ("D"). This principle of discourse ethics ("D") aims to ensure that all concerned do agree with the effects and effects of that norm if it applicable universally.

Habermas attempted to prove the validity of the principle of universalization ("U") by using it as a method of proof he called a transcendental pragmatism. Through this method Habermas would declare that only if the principle of universalization ("U") is acknowledged in its validity can one participate in a moral discourse. The proof of the principle of universality then states the linkage between the principle of universalization ("U") and the ethical principle of discourse ("D"). First, someone who wants to enter into an argument, will have to choose or not to accept the rules of discourse earlier. Secondly, once accepted, he should also agree that joint matters should be regulated in accordance with their common interests.

The procedure of universalizing moral norms as central to the ethics of discourse applied by Habermas in politics. This application is connected with Habermas' main goal in bringing about the idea of social integration. Habermas drew a consequence of the ethical procedure of discourse in political life in the thought of deliberative democracy. In the notion of deliberative democracy Habermas explains the communicative power of civil society to support the processes in the making of public norms in order to focus on social integration.

Keywords: discourse theory, social integration, practical discourse, discourse ethics, universalization of moral norms